

Masyarakat, Kebudayaan dan Politik

Daftar Isi

Akuntabilitas Diskresi Birokrasi di Era Otonomi Daerah Sri Juni Woro Astuti.....	85–94
Media Pers Lokal Melawan Korupsi Dwiyanto Indiahono	95–101
Model Penguatan Kapasitas Politik Anggota Legislatif Perempuan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Machya Astuti Dewi	102–111
Kampanye Calon Legislatif Perempuan DPRD Kabupaten Sidoarjo pada Pemilu 2009 Wahidah Zein Br Siregar	112–118
Upaya Pengentasan Kemiskinan di Madura sebagai Model Pengembangan Tanggung Jawab Sosial Ekna Satriyati dan Devi Rahayu.....	119–129
Penyusunan Kebijakan <i>Partnership</i> dan <i>Development</i> dalam Pemanfaatan Dana BUMN untuk Pengembangan UKM Priyono Tri Febrianto.....	130–138
<i>Social Early Warning System</i> untuk Mengantisipasi Konflik Sosial di Masyarakat Karnaji, Septi Ariadi, Soebagyo Adam, dan Siti Mas'udah	139–151
Kendala Pemerolehan Informasi Verbal Seputar <i>Issue Global Warming</i> pada Masyarakat Tamping Moch. Jalal	152–161
Study on Islamic Literature Viewed from Theosophical Perspective Amir Fatah	162–167

Upaya Pengentasan Kemiskinan di Madura sebagai Model Pengembangan Tanggung Jawab Sosial¹

Ekna Satriyati^{*2} dan Devi Rahayu^{**}

^{*} Jurusan Sosiologi, FISIB, Universitas Trunojoyo, Bangkalan, Madura

^{**}Bagian Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo

ABSTRACT

Many corporate social responsibility programs are ineffective because they are not based on the social need of the local community. This paper is based on a descriptive-and-qualitative research on the needs of the society in the social responsibility program of mining companies in Madura. This paper shows that the oil companies had conducted community development programs in education, health, economic, culture, social, and in religion activities aspects. There was a policy about community development program that was constructed by the local goverment. The models of corporate social responsibility that could fullfil the social need of the local community directly involved the community.

Key words: corporate social responsibility, oil company, local need, poverty elimination

Sebagai salah satu aktor institusional dalam masyarakat yang dibentuk dengan tujuan mendukung kesejahteraan masyarakat, industri memiliki fungsi sosial baik secara internal maupun eksternal. Kondisi kehidupan masyarakat yang semakin baik akan memberikan dampak yang cukup berarti terhadap keberlangsungan industri itu sendiri (Ramayana 2007). Kegiatan pengembangan masyarakat yang diselenggarakan oleh industri menunjukkan adanya kepedulian industri terhadap masyarakat di sekitarnya. Hal ini akan memunculkan adanya kepedulian masyarakat terhadap industri dan memandang industri sebagai pihak yang harus didukung dan dijaga oleh masyarakat. Dengan demikian, kegiatan pengembangan masyarakat tidak hanya akan memberikan manfaat untuk masyarakat, namun juga akan memberikan keuntungan sangat besar bagi industri dengan adanya pandangan positif dari masyarakat (Murdayati 2006).

Sesuai mandat UU Perseroan Terbatas, pasal 74 yang secara garis besar menyatakan mewajibkan kepada perusahaan untuk melakukan *corporate social responsibility*/tanggung jawab sosial dari hasil laba perusahaan (Untung 2008:25). Hal ini tentu direspon positif oleh para pelaku usaha, utamanya yang telah lama memiliki program sosial pada perusahaannya. Hal ini seperti yang dilakukan oleh PT Santos dengan berbagai program sosial yang ditujukan pada masyarakat di sekitar pabrik dan masyarakat umum,

seperti pemberian beasiswa, peningkatan akses sekolah, dan sebagainya. Sementara PT. Exxon dengan program sosial yang memfokuskan pada masyarakat umum seperti pemberian beasiswa, bakti olahraga, program penghijauan, dan sebagainya (Kompas 2008).

Secara keseluruhan kedua perusahaan pertambangan minyak tersebut memang telah melakukan program tanggung jawab sosial yang memiliki fokus yang berbeda sesuai dengan kebijakan masing-masing. Namun di sini ada posisi rentan masyarakat dan daerah di sekitar lokasi pertambangan yang masih memiliki pendidikan dan penghasilan rendah, kondisi lingkungan yang tidak mendukung, serta tidak memiliki keahlian tertentu, sehingga jika memandang posisi masyarakat dan desa sekitar lokasi pertambangan merupakan posisi urgen, maka seharusnya ada pula peran perusahaan pertambangan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar lokasi pertambangan (Rudi 2008).

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat dan desa di sekitar lokasi pertambangan (Wibisono 2008:27), agar mereka merasakan manfaat dari keberadaan perusahaan pertambangan di Madura. Konsep tanggung jawab sosial bagi masyarakat ini tentunya yang sesuai dengan kearifan lokal dan identitas daerah (Rudi 2008). Tentunya hal ini juga ditunjang dengan adanya kebijakan

¹ Hasil Penelitian Stranas Batch II 2009, dibiayai oleh Direktorat Perguruan Tinggi

² Korespondensi: E. Satriyati, FISIB, Universitas Trunojoyo, Jalan Raya Telang PO BOX 2 Kamal, Bangkalan, Telepon (031) 3011506, E-mail: ekna_satriyati@yahoo.com

dari pemerintah daerah untuk membuat suatu kebijakan daerah yang mengatur mengenai tanggung jawab sosial bagi perusahaan pertambangan yang melakukan eksploitasi alam di Madura.

Dengan demikian, tujuan khusus penelitian ini adalah: 1) mendapatkan informasi lengkap tentang desa-desa di Madura (2 kabupaten) yang berada di sekitar lokasi pertambangan, 2) mendapatkan informasi lengkap tentang keadaan masyarakat yang berada di sekitar lokasi pertambangan di Madura, 3) memahami secara mendalam pelaksanaan tanggung jawab sosial yang selama ini dilakukan perusahaan pertambangan di Madura, 4) memahami secara mendalam kebutuhan lokal masyarakat dan desa yang berada di lokasi pertambangan di Madura, 5) mendapatkan model tanggung jawab sosial perusahaan pertambangan berbasis kebutuhan lokal di Madura.

Penelitian yang dilakukan Wahyudi (2005:45) tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial oleh perusahaan di kabupaten Gresik, menghasilkan kesimpulan: 1) regulasi pemerintah (*government regulation*), yaitu peraturan yang dikeluarkan pemerintah daerah, menjadi aspek penting yang diperhatikan perusahaan sebelum mereka melakukan CSR, 2) kelompok masyarakat (*community*) merupakan elemen terpenting utamanya yang termasuk kelompok internal perusahaan yaitu karyawan, pemasok, dan buruh yang terkait kegiatan pemasokan merupakan elemen terpenting untuk dilakukannya CSR, 3) peran media massa dalam menyampaikan informasi pada masyarakat atas kegiatan CSR yang telah dilakukan oleh perusahaan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dekriptif untuk mengungkap persepsi, keadaan dan kebutuhan masyarakat dalam program tanggung jawab sosial perusahaan pertambangan di Madura. Penggalan kebutuhan lokal masyarakat dan desa di sekitar lokasi pertambangan dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan lokal, kebudayaan lokal, sumber daya lokal, keterampilan lokal, dan proses lokal (Rudi 2008).

Yang menjadi lokasi dari penelitian ini adalah kabupaten Sampang dan kabupaten Sumenep, alasan pemilihannya adalah: 1) kabupaten Sampang merupakan daerah yang terdapat lokasi pertambangan minyak PT Santos, 2) kabupaten Sumenep merupakan daerah yang terdapat lokasi pertambangan minyak PT KEI.

Populasi penelitian adalah seluruh masyarakat yang ada di sekitar lokasi pertambangan di Madura, tepatnya masyarakat di kecamatan Camplong kabupaten Sampang dan masyarakat di kepulauan Pagerungan Desar kabupaten Sumenep. Sampel penelitian adalah perusahaan tambang (PT Santos dan PT KEI), desa di sekitar tambang, warga masyarakat, dan birokrasi desa yang pernah mendapatkan/merasakan program tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh PT Santos dan PT KEI.

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yakni observasi dan wawancara mendalam (*indepth interview*). Eksplorasi dilakukan dengan teknik pengamatan yang secara langsung dilakukan di lokasi penelitian. Wawancara mendalam akan dipandu oleh pedoman wawancara (*interview guide*) yang berisi pertanyaan-pertanyaan terstruktur dari peneliti yang akan berkembang lebih lanjut pada saat wawancara di lapangan. Hal tersebut dilakukan agar wawancara lebih terarah.

Pemilihan informan berfokus pada perusahaan pertambangan dan desa, masyarakat dan birokrasi desa yang pernah menerima/merasakan pelaksanaan tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan pertambangan di kecamatan Camplong dan Kepulauan Pagerungan. Metode yang dipilih adalah model *snowball sampling* yakni menemukan informan dari keterangan-keterangan yang diberikan oleh informan sebelumnya.

Analisis data akan dilakukan dengan menggunakan metode Moleong (1995), yakni dimulai dari menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan data dari catatan lapangan. Setelah mereduksi data, kemudian mengabstraksikan, menyusun dalam satuan, mengkodefikasikan data, memeriksa kembali keabsahan data, dan terakhir adalah menafsirkan data.

Pemeriksaan keabsahan data diujikan dengan menggunakan metode yang dikembangkan triangulasi. Ada empat tipe triangulasi: triangulasi dengan sumber, metode, penyidik, dan teori. Triangulasi yang digunakan pada rencana penelitian ini adalah triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan antara lain membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara, sedangkan triangulasi metode dicapai dengan mengecek kepercayaan penemuan beberapa hasil penelitian dari teknik pengumpulan data serta mengulang mendatangi sumber data dengan metode yang sama (Denzin dalam Moleong 1995). Perpaduan observasi/pengamatan terlibat serta hasil wawancara

akan dicek kembali dengan metode yang sama untuk melengkapi data serta menghasilkan kesimpulan yang komprehensif.

Hasil Penelitian

Dari data monografi dan Sampang dalam Angka didapatkan kondisi desa dan masyarakat Desa Dharma Tanjung, Desa Dharma Tanjung merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Camplong. Desa Dharma Tanjung ini mempunyai letak geografis di daerah pesisir selatan Kabupaten Sampang. Desa Dharma Tanjung memiliki 6 dusun, antara lain: Dusun Daman, Dusun Pandiyan, Dusun Tanjung, Dusun Manceng, Dusun Majang, dan Dusun Dengkah.

Batas-batas tiap dusun di Desa Dharma Tanjung dengan wilayah lain adalah: sebelah utara, Dusun Daman berbatasan dengan Desa Tlagah; sebelah selatan, Dusun Manceng dan Dusun Majang berbatasan dengan Selat Madura; sebelah barat, Dusun Pandiyan berbatasan dengan Desa Sejati Kabupaten Sampang; sebelah timur, Dusun Dengkah berbatasan dengan Desa Bandaran Kabupaten Pamekasan.

Luas wilayah Desa Dharma Tanjung 1,90 km² (2,72%). Ditinjau dari topografi laut, desa ini mempunyai lahan kombinasi antara pantai dengan daratan dengan ketinggian hanya 17 m² dari permukaan laut. Letak desa ini cukup dekat dengan fasilitas desa yakni 6 km² dari kantor kecamatan, 1 km² dari puskesmas, 6 km² dari kantor polisi.

Sebagian penduduk dari total jumlah penduduk yakni 6.202 jiwa, bermatapencaharian sebagai nelayan dan petani tegalan. Sebagai nelayan, pendapatan yang diperoleh tidak tentu. Oleh sebab itu, mereka juga merangkap menjadi petani penggarap sawah dan tegalan. Ada sekitar 26.000 m² sawah dan 164.000 m² tegalan di Desa Dharma Tanjung yang dikerjakan warga dengan sistem garap sendiri maupun disewakan untuk digarap orang lain. Keseluruhan luas lahan sawah dan tegalan 190.000 m².

Jumlah penduduk Desa Dharma Tanjung seluruhnya adalah 6.202 jiwa dengan luas 1,90 per desa dan tingkat kepadatannya 3.264,21 jiwa. Perincian jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin yakni 2.950 jiwa laki-laki dan 3.252 jiwa perempuan. Jumlah kelompok tenaga kerja dengan usia produktif sebanyak 68%, sedangkan jumlah kelompok tenaga kerja non produktif 32% dari total jumlah penduduk. Mayoritas penduduk sekitar 60% berpendidikan cukup yakni lulus Perguruan Tinggi

dan SMU/SMK/Madrasah sedangkan 40% terbagi atas 25% hanya lulus SD/MI dan sisanya 15% tidak sekolah dari keseluruhan jumlah penduduk.

Desa Dharma Tanjung merupakan daerah pesisir di mana pada umumnya masyarakat sekitar memiliki sumber pendapatan dari pekerjaan sebagai nelayan dari hasil perikanan laut. Hasil laut ada yang langsung dijual ke pasar, ada pula yang mengolah hasil perikanan tersebut menjadi produk yang baru yakni petis dan kerupuk ikan. Biasanya hasil produksi ini disebut sebagai diversifikasi produk.

Pada bidang perdagangan, masyarakat menjual berbagai macam hasil produksi seperti kebutuhan bahan pokok pangan maupun sandang. Sedangkan, pada hari-hari tertentu terdapat para pedagang ikan hasil tangkap para nelayan maupun hasil perikanan olahan, mengingat Desa Dharma Tanjung ini merupakan salah satu lokasi sentra perikanan di Kabupaten Sampang.

Masyarakat juga bergerak pada bidang kerajinan yakni kerajinan bese' atau anyaman bambu untuk tempat ikan pindang. Beberapa kelompok masyarakat ada yang memilih bekerja informal yakni sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI) di Arab dan Malaysia. Mencermati kondisi perekonomian Indonesia yang semakin terpuruk dan penjelasan-penjelasan kondisi perekonomian masyarakat nelayan/pesisir yang menggantungkan penghasilannya dari hasil menangkap ikan saja. Berdasarkan kenyataan tersebut kondisi masyarakat terlihat jelas menurun tingkat kesejahteraannya. Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan tidak mempunyai kemampuan bersaing di era globalisasi. Ketidakmampuan itu semakin menyulitkan kehidupan masyarakat pada golongan yang hanya mampu hidup di bawah garis kemiskinan.

Dari data *Kecamatan Sapeken dalam Angka* dan *Kabupaten Sumenep dalam Angka* didapatkan gambaran mengenai kondisi geografis dan masyarakat Pagerungan Besar. Kondisi kehidupan ekonomi masyarakat Pulau Pagerungan Besar jauh lebih baik dibandingkan kepulauan yang lain di Sumenep. Mereka bisa menikmati pelayanan jaringan listrik gratis selama 24 jam, termasuk mendapatkan suplai air bersih gratis setiap pagi dan sore yang disalurkan melalui puluhan tandon air yang dibangun di permukiman penduduk. Selain memberikan fasilitas listrik dan air gratis, Kangean Energy Indonesia juga membangun pabrik es untuk masyarakat Pulau Pagerungan. Sebab, sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Dibandingkan dengan Pulau Sepanjang, kondisi

jalan di Pulau Pagerungan juga jauh lebih baik dan sudah diaspal atau dipaving. Penataan rumah-rumah penduduk juga lumayan modern dan tertata rapi.

Suasana rumah panggung yang menjadi ciri khas masyarakat setempat serasa seperti berada di Pulau Sulawesi. Apalagi, hampir semua warga Pulau Pagerungan berkomunikasi menggunakan bahasa Mandar dan bahasa Bajo. Tidak satu pun dari mereka menggunakan Bahasa Madura. Meskipun Pulau Pagerungan kaya sumber daya alam (SDA) minyak dan gas, masyarakatnya jarang berkunjung ke daratan Sumenep. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka justru lebih sering kulakan ke Banyuwangi atau ke Bali.

Secara geografis, letak Pulau Pagerungan sekitar 340 km sebelah timur Surabaya, persis berada di atas perairan Selat Sumbawa. Sehingga, meskipun secara administratif masuk wilayah Kabupaten Sumenep, waktu salat di sana mengikuti waktu Indonesia bagian tengah (WITA) atau lebih cepat satu jam dari waktu Sumenep. Karena jarak yang cukup jauh tersebut, sarana transportasi menuju Pagerungan hanya beroperasi setiap 12 hari sekali atau selama sebulan hanya ada dua kali, sehingga sebagian besar pegawai negeri sipil (PNS) yang bertugas di sana harus memboyong keluarganya.

Satu-satunya alat transportasi menuju Pagerungan dengan menggunakan kapal perintis dari Pelabuhan Kalianget ke Sapeken. Ongkosnya Rp40.000,00 dengan jarak tempuh selama 20 jam. Setelah itu dilanjutkan dengan naik perahu motor dari Pelabuhan Sapeken ke Pagerungan selama 2 jam. Sedangkan ongkosnya Rp12.000,00. Dibandingkan dengan Pulau Sepanjang, tingkat pendidikan masyarakat Pulau Pagerungan Besar jauh lebih baik. Di Pagerungan ada SMPN 2 Sapeken dengan guru mencapai 28 orang. Sebanyak 18 orang di antaranya berstatus PNS Pemkab Sumenep. Sisanya, 10 orang masih berstatus sebagai tenaga honorer.

Meski masuk wilayah Kabupaten Sumenep, suasana rumah panggung yang menjadi ciri khas bangunan penduduk setempat serasa seperti berada di Pulau Sulawesi karena hanya bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Mandar dan Bajo. Kebanyakan, bahkan lebih dari separuh pegawai KEI Pagerungan, adalah penduduk lokal. Biasanya mereka menjadi satpam atau bagian dapur, tapi gajinya cukup besar, rata-rata Rp3.000.000,00 sampai Rp4.000.000,00. Sebagian besar rumahnya juga rumah gedung dan berlantai keramik. Bagi penduduk yang tidak bekerja di KEI, mereka memilih menjadi nelayan atau berbudidaya rumput laut. Karena itu, jika nilai dolar naik, para nelayan di Pagerungan

dan sekitarnya senang. Sebab, penghasilan dari hasil tangkapan ikan dan rumput laut mereka ikut naik.

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial di Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep

Perihal penggunaan istilah tanggung jawab sosial bagi masyarakat Pagerungan Besar sangatlah tidak familiar karena selama ini istilah yang digunakan oleh perusahaan pertambangan minyak adalah *Community Development* (CD). Penggunaan istilah CD, dapat dikemukakan dengan istilah pengembangan masyarakat, sesungguhnya bersumber pada istilah *community development*, yang kemudian oleh Jack Rothman (Rudi 2008), disamakan pula dengan *locality development*.

Pengembangan masyarakat didefinisikan sebagai "sebuah model pengembangan masyarakat yang menekankan pada partisipasi penuh seluruh warga masyarakat". PBB (Suparjan 2004) mendefinisikan pengembangan masyarakat sebagai berikut:

Pengembangan masyarakat didefinisikan sebagai suatu proses yang dirancang untuk menciptakan kemajuan kondisi ekonomi dan sosial bagi seluruh warga masyarakat dengan partisipasi aktif dan sejauh mungkin menumbuhkan prakarsa masyarakat itu sendiri.

Dari definisi CD tersebut dapat dipahami bahwa keinginan dari perusahaan pertambangan minyak adalah untuk membuat kemajuan baik secara ekonomi dan sosial yang berasal dari prakarsa masyarakat sendiri.

Beroperasinya kegiatan pertambangan minyak di Pulau Pagerungan Besar sudah berlangsung cukup lama sejak sebelum tahun 2000. Perusahaan pertama yang melakukan kegiatan CD adalah PT ARCO. Pada saat ARCO melakukan kegiatan CD, perusahaan ini melakukannya sendiri, tanpa ada campur tangan pemerintah daerah maupun masyarakat. Sehingga pelaksanaan program CD pada saat itu bersifat top-down, dan tanpa memfasilitasi kebutuhan masyarakat Pagerungan Besar.

Walaupun melakukan kegiatan CD sendiri, namun menurut penuturan masyarakat di Pagerungan Besar, sudah banyak hal yang dihasilkan dari kegiatan CD. Barulah setelah tahun 2000, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep mulai membentuk CDC (*Community Development Commute*) yang di dalamnya terdapat unsur: 1) perusahaan pertambangan minyak, 2) pihak BP Migas, 3) Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep,

4) masyarakat, yang dalam hal ini diwakili oleh klebun/kepala desa.

Harapan dari adanya CDC tersebut adalah dapat terwadahnya keinginan dan kebutuhan masyarakat. Namun, dari hasil investigasi selama di Desa Pagerungan Besar, masyarakat menyatakan bahwa mereka tidak pernah diajak untuk berdiskusi atau mengadakan dialog untuk menggali kebutuhan masyarakat. Jadi, masyarakat hanya menerima segala fasilitas dan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan minyak, yang menurut mereka merupakan bentuk dari kegiatan CD.

Adapun perusahaan minyak yang pernah melakukan kegiatan pertambangan di Pagerungan Besar sampai saat ini sudah berganti-ganti perusahaannya. Secara pasti berapa lama masing-masing perusahaan pertambangan beroperasi masyarakat tidak mengetahui secara pasti. Hanya menurut penuturan masyarakat, sampai saat ini sudah ada tiga perusahaan pertambangan yaitu: ARCO, PT. EMP, dan KEI. Saat ini yang sedang melakukan eksplorasi di Pagerungan Besar adalah KEI.

Pemberian kegiatan CD sendiri oleh perusahaan pertambangan minyak diberikan berdasarkan pembagian kawasan. Artinya, terdapat beberapa kawasan yang memang secara langsung atau yang paling dekat dengan operasional kegiatan pertambangan menjadi kawasan prioritas dilakukannya kegiatan CD. Jika di kawasan prioritas ini beberapa kebutuhan sudah terpenuhi, maka pemberian fasilitas yang sama dapat dilakukan pada kawasan yang lain. Secara pemahaman, pembagian kawasan tersebut terdiri atas: Ring 1 Desa Pagerungan Besar, Ring 2 Desa Pagerungan Kecil, Ring 3 Kecamatan Sapeken, dan Ring 4, Kabupaten Sumenep.

Dari kegiatan CD yang telah dilakukan perusahaan pertambangan minyak selama ini sudah banyak fasilitas yang telah dibangun maupun beberapa kegiatan yang telah dilakukan. Secara keseluruhan, masyarakat Pagerungan Besar berpendapat bahwa keberadaan perusahaan pertambangan minyak di Pagerungan Besar sangatlah membantu memperbaiki kondisi masyarakat, bahkan ada yang berpendapat telah meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat di Pagerungan Besar. Secara keseluruhan, program CD dilakukan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, sarana ibadah, dan lain sebagainya.

Pendidikan, berupa pembangunan SMPN 2 Sapeken, karena tidak adanya sekolah SMP pada saat itu, untuk melanjutkan sekolah menengah pertama harus ke Pulau Sapeken. Pembangunan sekolah SMP

tersebut adalah membangun seluruh bangunan fisik sekolah beserta fasilitas olahraganya, juga dilengkapi dengan pembangunan rumah untuk kepala sekolah dan guru, karena guru yang ada berasal dari luar Pagerungan Besar.

Pembangunan sekolah SD, saat itu sudah terdapat sekolah SD di Pagerungan Besar, namun dengan fasilitas yang masih apa adanya dan belum memadai. Kemudian, perusahaan memperbaiki secara fisik gedung SD di Pagerungan Besar, bahkan mereka membangun secara keseluruhan sebuah SD dan sebuah sekolah Madrasah. Selain pembangunan sarana pendidikan secara fisik, perusahaan tambang minyak juga memberikan kebutuhan buku-buku di sekolah-sekolah di Pagerungan Besar. Pemberian beasiswa juga dilakukan pada anak-anak di Pagerungan Besar sampai tingkat S-1. Bahkan, perusahaan pertambangan bekerja sama dengan sekolah tinggi ilmu perikanan di Sidoarjo untuk menerima anak-anak dari Pagerungan Besar bersekolah secara gratis di tempat tersebut. Bagi para guru yang bekerja di Pagerungan Besar diberikan insentif pada setiap bulannya, baik guru SD maupun SMP, yang besarnya sekitar Rp300.000,00.

Sarana ibadah, berupa pembangunan beberapa masjid dan mushola telah dibangun dan sampai saat ini masih dimanfaatkan oleh masyarakat Pagerungan Besar. Kesehatan, perusahaan pertambangan minyak membangun sebuah puskesmas pembantu di Pagerungan Besar. Perusahaan pertambangan minyak juga menyediakan dokter yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

Sosial dan Budaya, pembangunan pabrik es di Pagerungan Besar dilakukan oleh perusahaan pertambangan minyak untuk mempermudah kegiatan ekonomi masyarakat yang sebagian besar bermatapencaharian sebagai nelayan. Perusahaan juga melakukan kegiatan sunatan massal yang dilakukan rutin pada setiap tahunnya. Selain itu, perusahaan pertambangan juga memberikan bantuan yang bersifat isidental, yaitu diberikan pada saat peringatan hari besar Islam. Gedung balai desa yang selama ini ada di pagerungan besar juga atas prakarsa perusahaan pertambangan minyak.

Pembangunan instalasi listrik secara mandiri oleh perusahaan pertambangan sangatlah membantu masyarakat pagerungan besar. Karena listrik di pagerungan besar menyala sepanjang hari dan masyarakat tidak dipungut biaya untuk penggunaan fasilitas listrik. Ini tentu berbanding terbalik dengan keadaan pulau-pulau lainnya yang hanya menyala pada pukul 17.00–05.00, bahkan beberapa pulau sama sekali belum ada fasilitas listrik. Penyulingan

air, dari air laut menjadi air yang layak untuk langsung diminum juga diberikan oleh perusahaan pertambangan minyak. Masyarakat pagerungan besar dapat menikmati hasil air penyulingan tersebut secara cuma-cuma. Dan ini bukanlah kegiatan yang dilakukan dengan biaya kecil, karena perlu biaya besar untuk memanfaatkan alat penyulingan tersebut. Membangun gedung yang digunakan oleh masyarakat untuk kegiatan pencak silat, yang menurut penuturan masyarakat pagerungan besar merupakan kegiatan nenek moyang mereka.

Kegiatan ekonomi, pemberian rumpon kepada masyarakat pagerungan besar yang berprofesi sebagai nelayan dan pemberian beberapa kapal yang digunakan untuk menangkap ikan juga dilakukan oleh perusahaan pertambangan minyak. Sedangkan kegiatan lainnya berupa pembangunan gelanggang olahraga dan beberapa fasilitas olahraga yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pagerungan besar. Kapal perintis yang awalnya hanya sampai di Kecamatan Sapeken mulai tahun 2009 dapat berlabuh di pelabuhan Pagerungan besar. Pembangunan sarana jalan di desa dengan melakukan pavingisasi di hampir seluruh jalan di desa pagerungan besar. Ada beberapa warga pagerungan besar yang bekerja di perusahaan pagerungan besar yaitu sekitar 100 orang (dari total 3700 orang penduduk pagerungan), yang rata-rata bekerja pada level security atau pekerja kasar.

Walaupun secara keseluruhan perusahaan pertambangan minyak telah melakukan kegiatan CD di Desa Pagerungan Besar namun masyarakat masih tetap menginginkan agar proses pemberian bantuan CD bersifat Bottom up. Yaitu masyarakat menginginkan adanya forum yang difasilitasi oleh tim CD Kabupaten Sumenep untuk dipertemukan secara langsung oleh pihak perusahaan pertambangan minyak. Agar mereka dapat mengungkapkan secara langsung keinginan mereka. Masyarakat berpendapat bahwa keberadaan Kepala Desa pada komite CD belum mencerminkan aspirasi mereka. Masyarakat sadar bahwa telah banyak yang didapatkan perusahaan tambang minyak dari daerah mereka, namun keuntungannya belum secara keseluruhan dinikmati masyarakat. Secara keseluruhan masyarakat menginginkan dibangunnya dermaga yang dapat disandari kapal-kapal penumpang besar, sehingga mereka dapat dengan mudah berkegiatan ke luar pulau.

Perihal buntutnya aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah dan perusahaan pertambangan minyak, pernah memicu terjadinya demo oleh masyarakat yang terjadi pada tahun 2007. Pada saat

itu masyarakat menuntut PT EMP untuk (Kompas 2007): 1) Bagi hasil dari eksplorasi di pagerungan besar sebesar 2 miliar setahun, 2) Perbaikan infrastruktur desa berupa jalan dan dermaga agar dapat disinggahi kapal perintis, 3) Agar pabrik es yang merupakan bentuk CD operasionalnya diberikan kembali pada EMP, 4) Lebih mempekerjakan karyawan yang berasal dari pagerungan besar.

Dari paparan beberapa masyarakat terdapat kekhawatiran mereka jika pagerungan besar tidak lagi menghasilkan minyak, maka mereka akan kebingungan untuk mendapat fasilitas listrik dan air yang selama ini didapatkan secara gratis. Belum lagi persoalan lingkungan yang nantinya akan mereka rasakan. Maka dari itu masyarakat menginginkan agar kegiatan CD lebih bersifat keberlanjutan dalam artian yang dapat memberikan nilai lebih dan memberikan keahlian terutama dalam pengolahan sumber daya laut yang melimpah.

Persoalan selanjutnya adalah perihal perluasan lokasi pertambangan yang setiap tahunnya selalu mengalami perluasan. Sehingga tanah warga pagerungan besar tiap tahunnya dibeli oleh pihak perusahaan pertambangan, yang berarti tanah warga semakin berkurang dan disisi lain tanah perusahaan pertambangan menjadi semakin luas. Kekhawatiran mereka nantinya adalah jika perusahaan pertambangan membutuhkan lebih banyak lahan lagi, sehingga bisa jadi Pulau Pagerungan Besar secara keseluruhan nantinya dimiliki oleh perusahaan pertambangan dan masyarakat diminta untuk berpindah tempat.

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial di Desa Darma Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang

Kegiatan pertambangan minyak di daerah sampang tepatnya di lepas pantai Camplong dilakukan oleh PT Santos. Santos sudah melakukan survei lokasi sejak tahun 2003. Namun baru melakukan operasional dan mengeluarkan minyak pada tahun 2008. Santos membuat kebijakan untuk memprioritaskan beberapa daerah yang menjadi fokus dari kegiatan CD, yaitu: Desa Sejati, Desa Taddan, Desa Oharma Camplong, Desa Dharma Tanjung, Desa Tambaan, Desa Banjar Talela, dan Kepulauan Mandangin.

Dari penuturan masyarakat didapatkan bahwa selama ini mereka tidak pernah melakukan komunikasi langsung dengan Santos untuk membicarakan bagaimana dan apa kebutuhan dari masyarakat terkait pelaksanaan kegiatan CD, Masyarakat pernah dikumpulkan satu kali pada tahun

2006 oleh pemerintah daerah Sampang, yang intinya memberitahukan bahwa dalam waktu dekat akan ada kegiatan pengeboran minyak di pesisir pantai Camplong. Nelayan diminta untuk tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan sampai radius 300 m di sekitar lokasi pertambangan. Padahal daerah dilakukannya pengeboran tersebut merupakan daerah terumbu tangan yang menjadi pusat berkumpulnya ikan.

Akibat dari kegiatan pengeboran itu masyarakat yang bermata pencarian sebagai nelayan harus mencari ikan lebih jauh, bahkan sampai daerah Pasuruan dan Banyuwangi. Yang berarti biaya untuk mencari ikan lebih besar sedangkan hasil yang kapan menjadi berkurang. Berarti pendapatan masyarakat nelayan di desa Darma Tanjung sejak beroperasinya Santos menjadi berkurang. Apalagi bagi nelayan kecil yang hanya memiliki perahu kecil, semakin mempersulit kondisi perekonomian mereka.

Santos baru menghasilkan kegiatan pengeborannya pada tahun 2008, karena terkait kegiatan CD baru beberapa hal yang bisa dihasilkan, antara lain: 1) Pada tahun 2007, mengadakan kegiatan sunatan masal di kecamatan Camplong yang diikuti oleh 600 orang anak, 2) Pada tahun 2008, bantuan pembangunan fisik berupa pembuatan selokan/got pembuangan air desa darma tanjung dan pembangunan beberapa jalan di sekitar desa dengan dipaving, 3) Pada tahun yang sama juga diberikan bantuan berupa pemerian buku-buku yang diserahkan pada perpustakaan di sekolah SD, 4) Diberikan bantuan untuk kegiatan pemindangan bagi beberapa pemindang yang difasilitasi LSM Pupuk Surabaya.

Secara keseluruhan masyarakat Darma Tanjung belum merasakan manfaat dari kegiatan CD, namun masyarakat berharap agar mereka diikutsertakan dalam proses penggalan informasi terkait kebutuhan masyarakat. Masyarakat menginginkan pemerintah daerah Sampang dapat menjadi penengah/mediasi dari masyarakat dan Santos

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pertambangan Minyak

Sebelum tahun 2000, pelaksanaan program pengembangan masyarakat (selanjutnya disebut program CD) yang dilaksanakan oleh ARCO tidak pernah melibatkan Pemerintah Kabupaten Sumenep. Pada saat itu memang tidak ada "hiruk pikuk" yang terdengar keluar, bahkan nyaris tak terdengar apa

yang dilakukan oleh ARCO dengan kegiatan program CD-nya dan hiruk pikuk hanya terjadi di lingkungan perusahaan dan masyarakat di lingkungan operasi perusahaan.

Seperti kita ketahui bersama bahwa pada saat itu seluruh perusahaan minyak dan gas bumi baik itu perusahaan dalam negeri maupun asing mendapatkan "proteksi" yang luar biasa dari pemerintah pusat dan Pertamina yang saat itu seolah-olah menjadi "penguasa tunggal" di sektor minyak dan gas bumi. Pemerintah daerah pada saat itu seolah-olah "tak berkutik" menghadapinya apalagi "tidak sedikitpun" kewenangan diberikan pada daerah di sektor minyak dan gas bumi.

Pada saat pelaksanaan program CD yang dilakukan oleh ARCO maupun oleh BP Kangean dan Muria (berpindah pengelolaannya pada BP Kangean dan Muria) dilakukannya sendiri mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya dan evaluasinya tanpa melibatkan Pemerintah Kabupaten Sumenep sehingga sejak awal tahun 2000 masyarakat di Wilayah operasi BP Kangean & Muria (Kec. Sapeken) banyak "menuntut" pada Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam hal ini pada Bupati Sumenep agar perusahaan minyak dan gas bumi yang beroperasi dalam Wilayah Kecamatan Sapeken (di Pulau Pagerungan Besar), lebih banyak mencurahkan bantuan pembangunan ke Kecamatan Sapeken.

Pemerintah Kabupaten Sumenep menyadari bahwa ARCO maupun BP Indonesia telah "berbuat banyak" pada masyarakat Kecamatan Sapeken, terutama yang ada di Ring I lokasi perusahaan (Pulau Pagerungan Besar), membangun gedung SMP lengkap dengan perumahan gurunya, membangun Sekolah Dasar, pembangunan jalan, Puskesmas Pembantu, bantuan listrik gratis air bersih gratis serta kegiatan pembangunan lainnya yang arahnya untuk "memberdayakan masyarakat" dan "meningkatkan indeks pembangunan manusia"; namun karena Pemerintah Kabupaten Sumenep tidak dilibatkan dalam pelaksanaan program CD tersebut sehingga tidak mengetahui secara pasti apa yang telah dilakukan oleh perusahaan (apalagi tidak ada laporan sama sekali dari perusahaan pada Pemerintah Kabupaten Sumenep), sehingga masyarakat merasa kurang puas terhadap apa yang telah dilakukan oleh perusahaan.

Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain, karena: a) banyak kegiatan yang tidak searah dengan skala prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumenep; b) terjadinya tumpang tindih pelaksanaan kegiatan antara

kegiatan program CD dengan program pemerintah daerah; c) tidak melibatkan masyarakat secara langsung khususnya dalam perencanaannya dan tidak terakomodirnya kehendak dan keinginan masyarakat;

Berdasarkan kenyataan itu, maka Bupati Sumenep memandang perlu untuk mengkoordinasikan kegiatan yang dilakukan oleh management ARCO, agar ailiusi di wilayah tetap kondusif, dengan cara men, fasilitasi masing-masing kepentingan, baik kepentingan masyarakat, perusahaan dengan cara membentuk Organisasi Komite Pengembangan Masyarakat atau Community Developarent Comitee (CDC) Pulau Pagerungan Besar dan Sekitarnya dan diterbitkanlah Surat Keputusan Bupati Sumenep, tanggal 4 Oktober 2000, Nomor 32 tahun 2000, tentang Pembentukan Komite Pengembangan Masyarakat Pulau Pagerungan Besar dan sekitarnya (CDC), setelah dilakukan koordinasi dengan pihak terkait.

Pertimbangan khusus yang dijadikan dasar dibentuknya CD yaitu: a) meredam gejolak masyarakat khususnya masyarakat kecamatan Sapeken kepada Pemerintah Kabupaten agar BP Indonesia segera memenuhi permintaan yang diajukan oleh masyarakat, b) agar program CD yang dilakukan oleh BP Indonesia sinkron dengan program kegiatan Pemerintah Kabupaten Samenep, c) mencegah terjadinya tumpang tindih/duplikasi kegiatan, pembangunan, d) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan ~percepat peningkatan keberhasilan pembangunan kiranya sinergi kegiatan pembangunan harus dilaksanakan antara Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat melalui program kegiatan yang terarah, e) bahwa apa yang telah dilakukan oleh ARCO dan dilanjutkan oleh BP Kangean & Muria merupakan bantuan dan dukungan pada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung sehingga perlu wadah untuk menampung, mewadahi dan mengkoordinasikannya.

Perkembangan selanjutnya dari kegiatan CD pada kecamatan Sapeken sesuai dengan kesepakatan yang dibuat bersama Management KEI, BP Migas, Komite CD Kecamatan Sapeken dan Pemerintah Kabupaten Sumenep menyatakan bahwa pelaksana dari kegiatan CD yang disepakati tidak lagi dilakukan oleh perusahaan melainkan dilaksanakan oleh masyarakat sendiri melalui kelompok masyarakat (Pok-Masy).

BP MIGAS sendiri telah menyetujui bahwa pelaksana kegiatan PROGRAM CD dilakukan oleh masyarakat sendiri melalui POKMASY dan pada saat kesepakatan itu diputuskan ikut hadir dan hal itu TIDAK BERTENTANGAN dengan

petunjuk Kepala BP Migas dengan Keputusan Nu 666/BPOOOD/2004 SI Buku Kedua tentang Pengembangan Masyarakat terkait dengan pola pelaksanaan kegiatan CD yang menjelaskan bahwa: Kontraktor KKS dapat melaksanakan sendiri program CD melalui fungsi organisasi yang ada atau bermitra dengan pihak lain misalnya Pemerintah Daerah setempat, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, LSM dan atau institusi lainnya.

Terkait dengan anggapan bahwa rencana kegiatan program CD perusahaan sengaja "diambil alih" oleh Komite yang sengaja dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep agar kegiatan program CD nantinya bisa dianggap/diakui sebagai program kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui kegiatan satuan kerjanya sehingga biaya untuk CD "bisa" masuk kantong sendiri/dikorupsi oleh para pejabatnya. Kecurigaan seperti ini adalah kecurigaan yang tak berdasar bahkan sengaja dibuat-buat oleh oknum tertentu untuk mencemarkan nama baik para pejabat Pemerintah Kabupaten Sumenep, karena setiap tahun antara kegiatan program CD dan kegiatan Satuan Kerja yang dibiayai oleh APBD, APBD I maupun APBN selalu "disandingkan" pada saat kegiatan program CD disyahkan oleh para stakeholder.

Bersinerginya program pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumenep dengan Program CD serta dukungan partisipasi masyarakat dapat menghasilkan percepatan pembangunan di wilayah itu dan telah dapat dilihat hasilnya dari meningkatnya Indeks Pembangunan manusia Kecamatan Sapeken yang berada di atas rata-rata IPM Kabupaten Sumenep. Sehingga dengan indikator naiknya angka IPM tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa program CD dapat mengurangi angka kemiskinan di Kecamatan Sapeken.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pelaksanaan Program CD di Kabupaten Sumenep, adalah sebagai berikut: Bahwa setiap perusahaan minyak, apalagi perusahaan tersebut "mengelola" sumber daya alam, memiliki kewajiban untuk ikut serta memikirkan dan melakukan kegiatan nyata pada masyarakat dan lingkungannya pada lokasi-lokasi perusahaan melakukan operasinya, apalagi perusahaan itu bergerak dalam bidang pengusahaan minyak dan gas bumi.

Bahwa perusahaan minyak dan gas bumi (KKKS) dalam melaksanakan "kewajiban" itu melalui program CD dan program yang dilaksanakan selama ini di Kabupaten Sumenep harus diakui dapat

mempercepat keberhasilan proses pembangunan karena program kegiatannya disinergikan dengan program pemerintah daerah sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat lebih terarah dan bersesuaian dengan hasil yang maksimal.

Bahwa Amanat dari AMDAL bahwa KKKS harus ikut peduli terhadap masyarakat di lingkungan wilayah operasinya dan ini hanya dapat dilakukan melalui Program CD dan program itu dapat pula diartikan sebagai kegiatan untuk mengurangi dampak sosial Amdal yang ditimbulkan oleh kegiatan perusahaan, karena pada dasarnya kegiatan yang dilakukan perusahaan lambat atau cepat akan menumbuhkan "kecemburuan sosial" manakala program CD tidak dilakukan.

Bahwa secara ekstrem program CD dapat pula diartikan sebagai salah satu bentuk kompensasi pada warga masyarakat dalam wilayah operasi karena merekalah yang paling terkena dampak dari kegiatan yang dilakukan oleh KKKS dan tidak perlu harus menunggu apakah perusahaan sudah memulai produksinya atau tidak tapi kegiatan program CD harus sudah dimulai sejak perusahaan itu memulai aktivitasnya di wilayah itu.

Bahwa KKKS memiliki kewajiban pula untuk memberdayakan masyarakat di lingkungan wilayah operasinya melalui program CD dan ini sebagai langkah memenuhi kewajiban moral dan tanggung sosial dalam ikut "memikirkan" lingkungan dan masyarakatnya yang pada akhirnya bertujuan agar perusahaan itu dapat eksis dalam melakukan aktivitasnya di daerah itu tanpa mendapat "gangguan" dari masyarakat di mana perusahaan itu beroperasi.

Bahwa Pelaksana kegiatan Program CD dapat dilakukan oleh masyarakat sendiri melalui Kelompok Masyarakat (POKMASY), dengan demikian kegiatan Program CD direncanakan dan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat, dengan harapan hasil kegiatan & manfaatnya dapat maksimal. Dan bahwa program CD merupakan "kewajiban" khususnya bagi KKKS apakah dananya dengan *Cost Recovery* atau tidak dan menjadi kewajiban Pemerintah dalam hal ini BP Migas untuk mengaturnya.

Kebijakan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Kabupaten Sampang

Realitas kemiskinan mendorong Pemerintah Kabupaten Sampang konsisten dalam pengembangan masyarakat (*community development -CD*). Langkah ini untuk meletakkan proporsi yang benar tentang konsistensi antara kebijakan, program, penentuan

sasaran, dan mekanisme pengembangan. Sehingga terjadi sinergi peran pemerintah, dunia usaha/swasta dan masyarakat sebagai pilar penting untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan.

Santos, representasi swasta di Kabupaten Sampang mencoba melakukan inisiasi dengan memberikan kontribusi bagi upaya pengembangan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya (*corporate social responsibility-CSR*). Program CD-Santos di wilayah desa sasaran manifestasinya berbentuk infrastruktur dan non infrastruktur. Reformasi menghendaki perubahan dalam melakukan pendekatan pengembangan masyarakat ke arah desain pemberdayaan yang partisipatif. Hal ini karena ada ketidakpuasan dari hasil pelaksanaan program pengembangan masyarakat pada periode yang lalu. Di sisi lain, pendekatan yang dilakukan belum menghasilkan penguatan kelembagaan di tingkat bawah, sehingga banyak program yang dirasakan tidak efektif dan lestari/berkelanjutan.

Karenanya dibuat formalisasi kelembagaan antara perusahaan Santos, pemerintah daerah Kabupaten Sampang dan masyarakat setempat. Yang diharapkan mampu menangkap aspirasi yang ada di masyarakat melalui pokmas masyarakat dan dapat melanjutkan aspirasi tersebut pada pertemuan komite CD antara pemerintah dan Santos.

Adapun tujuan dari kegiatan CD Santos adalah: mendukung dan melaksanakan program pengembangan masyarakat, memberdayakan masyarakat desa untuk dapat berperan aktif dalam pembangunan wilayah, mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan akses si miskin terhadap layanan dasar, meningkatkan fungsi prasarana dan sarana dasar, menciptakan lapangan kerja dan mendorong aktivitas ekonomi pada tingkat lokal.

Program akan diarahkan pada pembangunan, peningkatan, atau perbaikan sarana dan prasarana umum skala kecil yang dipilih/seleksi, direncanakan dan dikerjakan oleh masyarakat, seperti air bersih, irigasi, jalan, jembatan, tempat pengelolaan sampah, drainase, pasar, sanitasi (mandi, cuci, kakus-MCK), fasilitas transportasi air tambahan.

Besarnya alokasi dana yang diberikan secara hibah kepada desa melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) untuk pekerjaan fisik (belum termasuk pajak) adalah menjadi kebijakan PT. Santos dengan pertimbangan dari Komite Pengembangan Masyarakat kabupaten Sampang.

Kebijakan perusahaan santos adalah program CD yang memiliki keberlanjutan komitmen untuk berkontribusi terhadap upaya-upaya pencapaian pembangunan keberlanjutan di daerah operasinya.

Tujuan CD Santos adalah: Meningkatkan kualitas hidup, Menciptakan pengertian dan hubungan yang saling menguntungkan, Kemandirian masyarakat, Membantu upaya melestarikan budaya dan lingkungan hidup dan Mendukung Pemerintah setempat dalam upaya pembangunan daerah sesuai dengan kemampuan dan kebijakan perusahaan. Sedangkan bentuk program CD Santos adalah: Pendidikan, Kesehatan dan Konservasi.

Model Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pertambangan yang Sesuai dengan Kebutuhan Lokal di Madura

Dari pemaparan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan pertambangan minyak di Kabupaten Sumenep dan Sampang, secara keseluruhan telah melaksanakan program CD melalui sistem kelembagaan dalam suatu Komite CD yang terdiri atas Pemerintah Daerah, Perusahaan pertambangan minyak, BP Migas (selaku penanggung jawab kegiatan minyak dan gas) dan masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh pokmas (kelompok masyarakat).

Konsep tripartit (pemerintah-pengusaha-masyarakat) sebenarnya telah dilakukan dalam pelaksanaan program CD, namun dari hasil investigasi di masyarakat, baik masyarakat Pagerungan Besar dan masyarakat Darma Tanjung menuturkan bahwa aspirasi atau kebutuhan lokal masyarakat belum terpuenuhi. Di sini masyarakat Pagerungan Besar mengetahui bahwa telah ada Komite CD dan aspirasi masyarakat bisa disampaikan melalui media kelompok masyarakat. Namun masyarakat Pagerungan Besar menganggap bahwa kebutuhan yang selama ini tersampaikan hanyalah berdasarkan penuturan aparat desa dan beberapa tokoh masyarakat saja, bukanlah representasi masyarakat Pagerungan Besar. Karenanya masyarakat Pagerungan Besar meminta adanya suatu komunikasi langsung yang

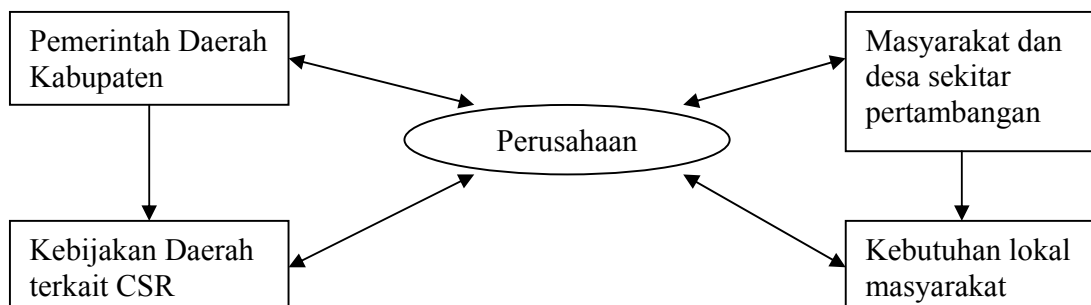
juga bersifat tripartit antara pemerintah daerah-pengusaha-masyarakat, tanpa melalui perwakilan aparat desa. Sehingga diharapkan dengan mekanisme tersebut kebutuhan lokal masyarakat Pagerungan besar dapat terpenuhi.

Sedangkan untuk konteks masyarakat Darma Tanjung, dari hasil investigasi lapangan didapat bahwa masyarakat selama ini tidak mengetahui bahwa untuk pelaksanaan CD Santos telah dibentuk Komite CD Kabupaten Sampang. Ketidaktahuan masyarakat ini karena selama ini masyarakat tidak pernah diajak berkomunikasi, baik oleh pemerintah maupun pengusaha mengenai pelaksanaan CD. Di sini terdapat kebingungan masyarakat terkait kemana mereka harus menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan lokal dalam pelaksanaan CD. Dari pemaparan masyarakat didapatkan keinginan/kebutuhan lokal masyarakat terhadap program CD adalah terkait program pendidikan berupa beasiswa, program pelatihan ketrampilan/life skill, program bantuan alat-alat untuk kegiatan ekonomi dan program konservasi alam.

Secara keseluruhan masukan terkait pelaksanaan CD yang sesuai dengan kebutuhan lokal masyarakat Madura adalah terkait buntutnya aspirasi dari masyarakat pada komite CD, maka diperlukan ruang dialektika yang secara langsung antara masyarakat – pemerintah – pengusaha, dalam artian perwakilan dalam konsep pokmas yang dirasa tidak efektif dapat diminimalisasi dengan komunikasi langsung tersebut. Sehingga diharapkan kebutuhan lokal masyarakat daerah sekitar pertambangan minyak dapat terpenuhi.

Kekhawatiran masyarakat terkait ketergantungan dengan keberadaan perusahaan dan pelaksanaan program CD, maka harapannya adalah bahwa program CD harusnya bersifat sustainable yang berupa life skill dan bantuan alat-alat yang merupakan penunjang kegiatan ekonomi masyarakat sekitar tambang.

Bahwa program konservasi alam haruslah menjadi prioritas program CD perusahaan pertambangan



minyak, karena dampak dari kegiatan pertambangan akan dirasakan oleh masyarakat pasca kegiatan eksplorasi minyak. Sehingga konsep konservasi alam diperlukan untuk meminimalisasi dampak dari kerusakan lingkungan yang timbul.

Program CD diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Pagerungan Besar dan Darma Tanjung secara lebih merata, sehingga harapan bahwa program CD dapat menjadi salah satu stimulus untuk mengurangi angka kemiskinan dengan cara meningkatkan Indeks Pembangunan Masyarakat. Karenanya perlu adanya akuntabilitas dan transparansi dalam Komite CD, ini didasarkan penuturan masyarakat, bahwa hanya orang-orang yang dekat dengan aparat desa saja yang dapat merasakan program CD, dapat diminimalkan

Simpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, Bahwa kondisi desa-desa di sekitar lokasi pertambangan minyak di Madura adalah a) secara geografis terletak di pesisir pantai Madura, b) sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai nelayan ataupun pengolah sumber daya laut, c) pendidikan rata-rata penduduk cukup baik, bahkan sudah banyak yang lulusan Perguruan Tinggi (Pagerungan Besar) sedangkan di Darma Tanjung rata-rata lulusan SMA, d) tidak banyaknya ragam pekerjaan, karena memiliki ketergantungan dengan pemanfaatan sumber daya laut.

Kedua, keadaan masyarakat di sekitar lokasi pertambangan minyak memiliki keunikan yang tersendiri, terutama di Pagerungan Besar yang mayoritas penduduknya adalah orang bajo. Sehingga bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa Bajo dan Mandar, bahasa Madura hanya sebagai bahasa kedua. Rumah masyarakat pagerungan besar berbentuk panggung seperti rumah orang Sulawesi. Karakter masyarakat Pagerungan Besar lebih menyamai masyarakat Sulawesi daripada Madura. Sedangkan Masyarakat Darma Tanjung, seperti karakter masyarakat pesisir Madura lainnya, rumah di pesisir pantai, bahasa Madura sebagai bahasa sehari-hari dan memiliki permasalahan terkait sanitasi.

Ketiga, bahwa selama ini telah dilakukan program CD oleh perusahaan pertambangan, yang bentuk-

bentuk dari kegiatan CD adalah: a) pendidikan: pembangunan dan pemberian fasilitas pendidikan seperti beasiswa, b) kesehatan, pembangunan sarana puskesmas pembantu, c) ekonomi, penyediaan rumpun, d) pembangunan tempat ibadah, Sosbud, pembangunan pabrik es.

Keempat, pelaksanaan CD berdasarkan kebijakan pemerintah daerah telah dilakukan oleh Komite CD. Yang terdiri atas pemerintah, pihak pengusaha serta BP Migas dan masyarakat yang diwakili oleh Pokmas.

Kelima, bahwa model pelaksanaan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan kebutuhan lokal masyarakat Madura haruslah dibangun ruang dialektikan secara langsung dengan masyarakat. Karena representasi masyarakat dalam pokmas dianggap masyarakat belum mensuarakan keinginan/kebutuhan lokal masyarakat.

Daftar Pustaka

- Anonim (2008) Kabupaten Sampang dalam Angka. Badan Pusat Statistik, Sampang.
- Anonim (2009) Kabupaten Sumenep dalam Angka. Badan Pusat Statistik, Sumenep.
- Kompas (2008) Laporan CIFON terhadap pelaksanaan CSR perusahaan di Kutai. Tidak dipublikasi.
- Murdayati (2006) Peran *corporate social responsibility* bagi masyarakat. Jurnal Littai 12 (4): 2–3.
- Ramayana (2007) Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Serta Kemitraan Tiga Sektor, hasil seminar, Lingkar studi CSR. Pamekasan, 18 November 2007.
- Rudi (2008) CSR, Community Development dan Kearifan Lokal. Diakses pada hari Jumat Tanggal 13 Februari 2008.
- Rudi Community Development (2008) Apa dan Bagaimana? Diakses pada hari Jumat Tanggal 13 Februari 2008.
- Suparjan dan Sunyatno, H (2004) Pengembangan Masyarakat: Dari Pembangunan sampai Pemberdayaan. Yogyakarta: Aditya Media.
- Untung, H (2008) Corporate Social Responsibility. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahyudi, I (2008) Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan dan Implementasi. Malang: In-Trans Publing.
- Wibisono, Y (2007) Membedah Konsep dan Aplikasi CSR. Gresik: Pascho Publishing.